



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
INSPEKTORAT
Jalan Mayor Sugianyar No. 3 Telp. (0365) 41222 Negara

Nomor : 700/ /Itkab. Negara,
Lampiran : 1 (satu) Set Kepada
Hal : **Laporan Hasil Evaluasi (LHE)** Yth. Bupati Jemberana
Akuntabilitas Kinerja Tahun di –
Negara

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Keputusan MENPAN Nomor: KEP-135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permen PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar Penugasan

- a.
- b.
- c.

2. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
- b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
- d. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Hasil Evaluasi

- a. Evaluasi dilaksanakan terhadap 3 (tiga) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; dan Pelaporan kinerja.
- b. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun....., merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen

Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.

- c. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dengan kisaran nilai mulai dari 0 s.d 100.
- d. Apabila hasil evaluasi terhadap seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana tersebut diakumulasikan, maka memperoleh nilai rata-rata..... atau dengan kategori (.....), yaitu dengan rincian :
 - a)
 - b)
 - c)
 - d)

4. Pelaksanaan Tahapan Evaluasi

Nilai sebagaimana tersebut diatas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana seperti terlampir, dengan rincian nilai rata-rata sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja

Evaluasi perencanaan kinerja mencakup penilaian atas dokumen Rencana Strategis, (Ranstra) dan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Hasil evaluasi secara umum atas perencanaan kinerja memperoleh nilai rata-rata sebesar dari nilai maksimal 50,00, dengan penjelasan sebagai berikut :

(1). Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra)

Evaluasi terhadap dokumen perencanaan jangka menengah /rencana strategis memperoleh nilai dari nilai maksimal 17,86.

Pencapaian tersebut antara lain disebabkan:

a) Pemenuhan Renstra

Evaluasi terhadap pemenuhan Renstra memperoleh nilai dari nilai maksimal 3,57.

Hal ini dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut :

-
-
- dst

b) Kualitas Renstra

Evaluasi terhadap Kualitas Renstra memperoleh nilai dari nilai maksimal 8,93.

Hal ini dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut :

-
-
-
- dst

c) Implementasi Renstra

Evaluasi terhadap Implementasi Renstra memperoleh nilai dari nilai maksimal 5.36.

Hal ini dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut :

-
-
-
- dst

(2). Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Strategis (RKT)

Evaluasi terhadap dokumen rencana kinerja tahunan memperoleh nilai dari nilai maksimal 32,14.

Pencapaian tersebut antara lain disebabkan:

a) Pemenuhan RKT

Evaluasi terhadap pemenuhan RKT memperoleh nilai dari nilai maksimal 6,43.

Hal ini dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut :

-
-
-
- dst

b) Kualitas RKT

Evaluasi terhadap Kualitas RKT memperoleh nilai dari nilai maksimal 16,07.

Hal ini dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut :

-
-
-
- dst

c) Implementasi RKT

Evaluasi terhadap Implementasi RKT memperoleh nilai dari nilai maksimal 9,64.

Hal ini dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut :

-
-
-
- dst

B. Pengukuran Kinerja

Evaluasi pengukuran kinerja meliputi penilaian atas Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran dan Implementasi Pengukuran.

Hasil evaluasi secara umum atas pengukuran kinerja memperoleh nilai dari nilai maksimal 28,57 dengan penjelasan sebagai berikut:

(1). Pemenuhan Pengukuran

Evaluasi terhadap Pemenuhan Pengukuran memperoleh nilai dari nilai maksimal 5,71.

Hal ini disebabkan oleh :

-
-
- dst

(2). Kualitas Pengukuran

Kualitas Pengukuran memperoleh nilaidari nilai maksimal 14,29.

Hal ini dipengaruhi oleh :

-
-
- dst

(3). Implementasi Pengukuran

Evaluasi terhadap implementasi pengukuran kinerja memperoleh nilai dari nilai maksimal 8,57.

Hal ini dipengaruhi oleh :

-
- dst

C. Pelaporan Kinerja

Evaluasi pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan informasi kinerja.

Hasil evaluasi secara umum atas pelaporan kinerja memperoleh nilai dari nilai maksimal 21,43 dengan penjelasan sebagai berikut:

(1). Pemenuhan Pelaporan

Evaluasi terhadap pemenuhan pelaporan memperoleh nilai dari nilai maksimal 4,29

Hal ini dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut :

-
-
-
- dst.

(2). Penyajian Informasi Kinerja

Evaluasi terhadap penyajian informasi kinerja memperoleh nilai dari nilai maksimal 11,43.

Hal ini dipengaruhi oleh:

-
-
-
- dst

(3). Pemanfaatan Informasi Kinerja

Evaluasi terhadap pemanfaatan informasi kinerja memperoleh nilaidari nilai maksimal 5,71.

Hal tersebut karena :

-
-
- dst

d. Rekomendasi Evaluasi Tahun Lalu yang belum ditindaklanjuti.

Rekomendasi tahun lalu (Evaluasi LAKIP Tahun.....) yang belum ditindak lanjuti oleh Dinas/Badan/Kantor.....,yaitu :

- 1
- 2
- 3 dst

5. Saran-Saran

Terrhadap hasil evaluasi LAKIP Tahun.....dan dalam rangka mengembangkan Sistem AKIP pada Dinas/Badan/Kantor Kabupaten Jembrana, kami sarankan hal-hal sebagai berikut:

- a.
- b.
- c. dst

Demikian kami sampaikan hasil evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

INSPEKTUR KABUPATEN JEMBRANA,

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta (sebagai laporan).
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta (sebagai laporan).
3. Gubernur Bali di Denpasar (sebsgsi laporan).
4. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali di Denpasar (sebagai laporan).
5. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Bali di Denpasar (sebagai laporan).
6. Wakil Bupati Jembrana di Negara (sebagai laporan).
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara (untuk maklum).